



**PENGARUH RASIO KEUANGAN DAERAH TERHADAP  
PERTUMBUHAN EKONOMI  
(Studi Kasus 32 Pemerintah Kabupaten Dan Kota Sumatera Utara)**

Dr.Oktarini Khamilah Siregar, SE, M.Si

Junawan, SE, M.Si.

Universitas Pembangunan Pancabudi

[oktarinikhamilah@dosen.pancabudi.ac.id](mailto:oktarinikhamilah@dosen.pancabudi.ac.id)

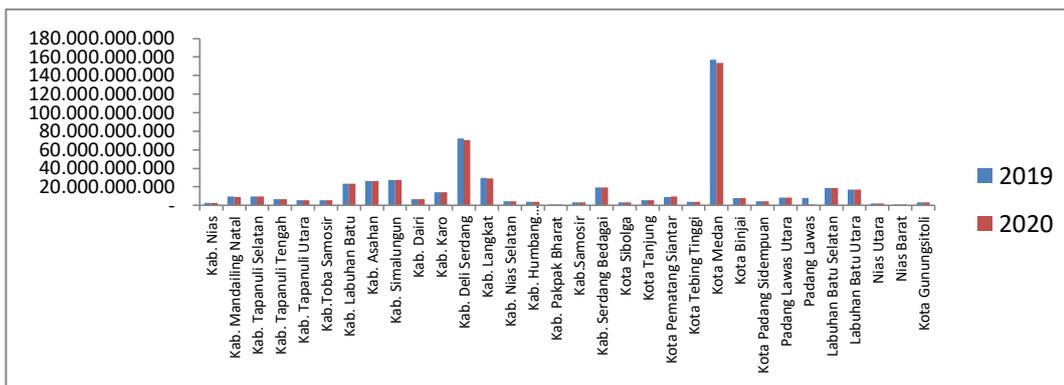
**ABSTRACT**

*Economic growth is the performance of the results of the regional government in obtaining an increase in the output per capita of the region. During the COVID-19 period, local governments experienced a drastic decline in economic growth. Indicators in increasing economic growth other than from a macroeconomic perspective need to be examined from a financial perspective. The purpose of this study was to examine the Regional Financial Independence Ratio, Regional Financial Dependence, Regional Income Growth Analysis, Regional Expenditure Ratio to Gross Regional Domestic Product and Regional Debt Ratio to Gross Regional Domestic Product effect on Gross Regional Domestic Product in Constant Prices at City/Regency Governments in North Sumatra. Research method with causal associative approach with panel data. The research sample is in the form of panel data from 32 City and Regency Governments during 2019 to 2020. The results of this study use the Fixed Effect Model, showing partial results that the Regional Financial Independence Ratio, Regional Financial Dependence, Regional Income Growth Analysis, Regional Expenditure Ratio to Product Gross Regional Domestic Product and the Ratio of Regional Debt to Gross Regional Domestic Product do not have a positive effect on Gross Regional Domestic Product in Constant Prices at City/Regency Governments in North Sumatra. Economic growth during the COVID-19 period experienced a decline because there was no achievement of regional income in 32 city and district governments in North Sumatra. Local government policies really need to be carried out in evaluating regional financial performance such as making payments for taxes and regional levies online, because technological advances are fully used in improving local financial management for City and Regency governments in order to increase economic growth and ultimately create a prosperous society.*

**Keywords:** *Regional Financial Ratios and GRDP at Current Prices*

**PENDAHULUAN**

Pertumbuhan ekonomi suatu wilayah dipengaruhi oleh terpadunya kontribusi beberapa faktor, seperti pemberdayaan PAD. Pemerintah daerah dapat mewujudkan melalui PP No. 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Permendagri No.13 Tahun 2006 dan Permendagri No.13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah yang bertujuan agar memudahkan dalam pelaksanaannya dan tidak menimbulkan multi tafsir dalam penggunaannya. Berikut gambar kondisi Pertumbuhan Ekonomi pada 32 pemerintah Kota dan Kabupaten di Sumatera Utara sebagai berikut.

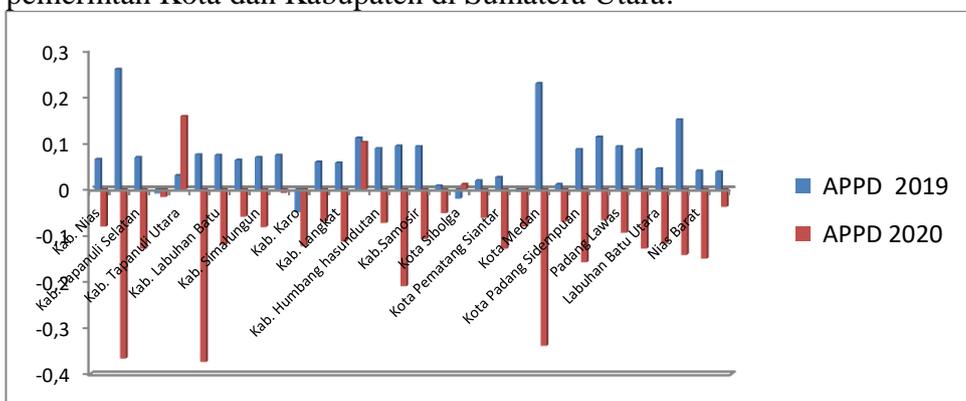


Sumber : BPS, 2022

**Gambar 1.1 Pertumbuhan Ekonomi Pemerintah Kabupaten dan Kota, Sumatera Utara Tahun 2019 dan 2020**

Berdasarkan Gambar 1.1 bahwa pertumbuhan ekonomi untuk pemerintah kabupaten dan kota di Sumatera Utara memiliki perbedaan yang signifikan. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi terdapat pada pemerintah Kota Medan sebesar 156.780.580.000 tahun 2019 dan 153.669.830.000 tahun 2020. Hampir 50% dari jumlah 32 Pemerintah kabupaten dan kota di Sumatera Utara bahwa PDRB dalam harga konstan masih banyak yang rendah. Pemerintah Kota dan Kabupaten harus lebih berjuang dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi agar pembangunan daerah semakin meningkat. Terjadi ketimpangan yang tidak merata pertumbuhan ekonomi di pemerintah kabupaten dan kota Sumatera Utara.

Salah satu penyebabnya adalah letak geografis setiap daerah berbeda dan penggalan potensi daerah untuk setiap daerah berbeda karena rendahnya sumber daya manusia daerah tersebut. Sehingga pembangunan setiap daerah tidak merata akibat tidak terpantau oleh pemerintah Provinsi Sumatera Utara dan tidak ada motivasi pemerintah kota dan kabupaten dalam meningkatkan pembangunan serta pemerintah tersebut jauh dari Ibu Kota Provinsi Sumatera Utara. Maka untuk itu setiap daerah harus dapat meningkatkan pendapatan daerahnya agar pembangunan daerah semakin meningkat. Pendapatan daerah dimasa covid19 mengalami penurunan yang dratis karena adanya kebijakan pemerintah untuk mengurangi aktivitas bekerja. Berikut perkembangan Pertumbuhan Pendapatan Daerah, pemerintah Kota dan Kabupaten di Sumatera Utara:



Sumber : BPS, 2022

**Gambar 1.2 Analisis Pertumbuhan Pendapatan Daerah Pemerintah Kabupaten dan Kota, Sumatera Utara Tahun 2019 dan 2020**

Pada Gambar 1.2 terlihat terjadi perbedaan grafik arah positif dan negatif tentang perkembangan pertumbuhan pendapatan daerah di tahun 2019 menuju tahun 2020. Pemerintah kota dan kabupaten yang mengalami penurunan pertumbuhan pendapatan daerah yang disebabkan covid19 seperti pemerintah Kota Medan menurun sebesar 0.339 dan pemerintah kabupaten mandaling natal menurun sebesar 0.366. Dan Pemerintah Kota. Dengan kondisi pertumbuhan pendapatan daerah seperti ini maka daerah akan susah untuk dapat membiayai belanja daerahnya. Karena jika Belanja, Pendapatan dan Utang daerah tinggi maka akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi meningkat dan sebaliknya untuk pemerintah Kabupaten dan kota lainnya di Sumatera Utara, apabila strategi yang dilaksanakan tercapai secara optimal. Akan tetapi besarnya belanja sama dengan pendapatan pemerintah kabupaten dan kota di Sumatera Utara maka disimpulkan pemerintah tersebut tidak dapat menyimpan pendapatannya untuk keperluan tahun berikutnya untuk pemerintah kabupaten dan kota di Sumatera Utara. Meskipun belanja yang semakin meningkat dapat memacu pertumbuhan ekonomi setiap tahunnya dan berdampak pada kesejahteraan masyarakat di Pemerintah kabupaten dan kota di Sumatera Utara.

Marijana Badun (2009) mengatakan sistem keuangan memacu pertumbuhan ekonomi dan hal terpenting untuk mengetahui kapan dan dalam keadaan apa sektor keuangan memiliki pengaruh positif pada pertumbuhan ekonomi dan apa yang menentukan efisiensi sehingga pemerintah berperan penting untuk mengetahui kapan sistem keuangan berubah lebih baik atau buruk. Seperti pendapat Magdalena K (2012) bahwa pengukuran kinerja keuangan tidak hanya pada indikator keuangan tetapi termasuk indikator non-keuangan berfungsi untuk melihat pengukuran tindakan kinerja keuangan dan berdampak pada peningkatan kualitas. Jika sarana dan prasarana memadai maka masyarakat dapat melakukan aktivitas sehari-harinya secara aman dan nyaman yang akan berpengaruh pada tingkat produktivitasnya yang semakin meningkat, dan dengan adanya infrastruktur yang memadai akan menarik investor untuk membuka usaha di daerah tersebut. Dengan bertambahnya belanja modal maka akan berdampak pada periode yang akan datang yaitu produktivitas masyarakat meningkat dan bertambahnya investor akan meningkatkan pendapatan asli daerah. Dengan ditambahkan infrastruktur dan perbaikan infrastruktur yang ada oleh pemerintah daerah, diharapkan akan memacu pertumbuhan perekonomian di daerah. Tujuan penelitian untuk menguji Rasio Kemandirian Keuangan Daerah, Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah, Analisis Pertumbuhan Pendapatan Daerah, Rasio belanja daerah terhadap PDRB, Rasio Utang terhadap PDRB berpengaruh terhadap PDRB dalam harga konstan di Pemerintah Kota dan Kabupaten Sumatera Utara ?

## **TINJAUAN PUSTAKA**

### **1. Teori Pertumbuhan Ekonomi**

Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator yang amat penting dalam melakukan analisis tentang pembangunan ekonomi yang terjadi pada suatu negara. Ada beberapa definisi pertumbuhan ekonomi (*economic growth*) yang dikemukakan para ekonom dengan menggunakan sudut pandang yang beragam, tetapi pada dasarnya kesemuanya mempunyai pengertian yang sama. Untuk mengetahui adanya pertumbuhan ekonomi suatu negara, diperlukan suatu

indikator. Sadono (2008) menyatakan bahwa indikator yang dapat digunakan untuk mengukur pertumbuhan ekonomi yaitu : a. Produk Domestik Bruto (PDB/PDRB), b. Produk Domestik Bruto Perkapita/Pendapatan Perkapita. dan c. Pendapatan Per Jam Kerja.

Perkembangan ekonomi mengandung arti yang lebih luas serta mencakup perubahan pada susunan ekonomi masyarakat secara menyeluruh. Pembangunan ekonomi pada umumnya didefinisikan sebagai suatu proses yang menyebabkan kenaikan pendapatan riil per kapita penduduk suatu negara dalam jangka panjang yang disertai oleh perbaikan sistem kelembagaan. Pembangunan ekonomi merupakan suatu proses yang berarti perubahan yang terjadi terus menerus, usaha untuk menaikkan pendapatan per kapita, kenaikan pendapatan per kapita harus terus berlangsung dalam jangka panjang dan yang terakhir perbaikan sistem kelembagaan disegala bidang (misalnya ekonomi, politik, hukum, sosial, dan budaya). Sistem ini bisa ditinjau dari dua aspek yaitu: aspek perbaikan di bidang organisasi (institusi) dan perbaikan di bidang regulasi baik legal formal maupun informal. Dalam hal ini, berarti pembangunan ekonomi merupakan suatu usaha tindakan aktif yang harus dilakukan oleh suatu negara dalam rangka meningkatkan pendapatan per kapita. Dengan demikian, sangat dibutuhkan peran serta masyarakat, pemerintah, dan semua elemen yang terdapat dalam suatu negara untuk berpartisipasi aktif dalam proses pembangunan.

## **2. Laporan Keuangan**

Reformasi sektor publik berarti juga adanya reformasi keuangan daerah. Reformasi keuangan daerah dalam pelaksanaannya akan berdampak juga terhadap reformasi anggaran (*budgeting reform*) yang meliputi proses penyusunan, pengesahan dan pertanggung jawaban anggaran. Laporan keuangan terutama digunakan untuk membandingkan realisasi pendapatan belanja, transfer, dan pembiayaan dengan anggaran yang telah ditetapkan, menilai entitas pelaporan, dan membantu menentukan ketaatannya terhadap peraturan perundang-undangan (kerangka konseptual akuntansi pemerintah, paragraf 21). Tujuan Pernyataan Standar ini adalah mengatur penyajian laporan keuangan untuk tujuan umum (*general purpose financial statements*) dalam rangka meningkatkan keterbandingan laporan keuangan baik terhadap anggaran, antar periode, maupun antar entitas. Laporan keuangan pemerintah daerah untuk tujuan umum yang selanjutnya disebut dengan laporan keuangan pemerintah daerah disusun dan disajikan sekurang-kurangnya setahun sekali untuk memenuhi sejumlah besar pemakai (Bastian, 2010).

## **3. Analisa Laporan Keuangan Pemerintah Daerah**

Untuk memperoleh gambaran tentang perkembangan keuangan suatu perusahaan, perlu dilakukan suatu interpretasi atau analisis terhadap data keuangan dari perusahaan yang bersangkutan, dan data keuangan itu akan tercermin dalam laporan keuangannya. Laporan keuangan melaporkan baik posisi perusahaan pada suatu waktu tertentu maupun operasinya selama beberapa periode yang lalu. Terdapat berbagai jenis rasio yang dapat digunakan untuk mengevaluasi dan menginterpretasikan laporan keuangan. Hasil dari perhitungan rasio-rasio keuangan perlu diinterpretasikan, sehingga darinya dapat dievaluasi kinerja keuangan organisasi dan selanjutnya dilakukan pengambilan keputusan tertentu (Bastian, 2010).

#### **4. Pengukuran Kinerja Pemerintah Daerah**

Pengukuran kinerja sektor publik dilakukan untuk memenuhi tiga maksud *Pertama*, pengukuran kinerja sektor publik dimaksudkan untuk membantu memperbaiki kinerja pemerintah. Ukuran kinerja dimaksudkan untuk dapat membantu pemerintah berfokus pada tujuan dan sasaran program unit kerja. Hal ini pada akhirnya akan meningkatkan efisiensi dan efektivitas organisasi sektor publik dalam memberikan pelayanan sektor publik. *Kedua*, ukuran kinerja sektor publik digunakan untuk mengalokasikan sumber daya dan pembuatan keputusan. *Ketiga*, ukuran kinerja sektor publik dimaksudkan untuk mewujudkan pertanggungjawaban publik dan memperbaiki komunikasi kelembagaan (Ihyahul Ulum, 2009).

#### **5. Rasio Kinerja Keuangan Daerah**

Menurut Mahmudi (2009) ada beberapa model rasio yang akan mengukur kinerja keuangan pemerintah daerah adalah sebagai berikut:

##### **a. Rasio Kemandirian Keuangan Daerah**

Rasio ini membandingkan jumlah penerimaan PAD dibagi dengan jumlah pendapatan transfer dari pemerintah pusat dan propinsi serta pinjaman daerah. Semakin tinggi angka rasio ini menunjukkan pemerintah daerah semakin tinggi kemandirian keuangan daerah.

Rumus Rasio Kemandirian Keuangan Daerah (RaKemKD) :

$$= (\text{Pendapatan Asli Daerah} / \text{Transfer pusat} + \text{Propinsi} + \text{Pinjaman}) \times 100\%$$

##### **b. Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah**

Rasio ini membandingkan jumlah pendapatan transfer yang diterima oleh penerimaan daerah dengan total penerimaan daerah. Semakin tinggi angka rasio ini maka semakin besar tingkat ketergantungan pemerintah daerah terhadap pemerintah pusat atau propinsi.

Rumus Rasio Ketergantungan keuangan daerah (RaKetKD)

$$= (\text{Pendapatan Transfer} / \text{Total Pendapatan daerah}) \times 100\%$$

##### **c. Analisis Pertumbuhan Pendapatan Daerah**

Rasio dengan melihat kinerja pertumbuhan pendapatan secara positif atau negatif. Jika pertumbuhan pendapatan bersifat positif maka cenderung mengalami peningkatan dan sebaliknya.

Rumus Analisis Pertumbuhan Pendapatan Daerah (APPD)

$$= \frac{\text{Pendapatan Daerah Thn (t)} - \text{Pendapatan Daerah Thn (t-1)}}{\text{Pendapatan Daerah Thn (t)}}$$

##### **d. Rasio Belanja Daerah terhadap PDRB (RBDPDRB)**

Rasio ini membandingkan antara total belanja daerah dengan PDRB yang dihasilkan daerah. Manfaat rasio ini menunjukkan produktivitas dan efektivitas belanja daerah. Rumus rasio adalah

$$\text{Rumus Rasio Belanja Daerah terhadap PDRB} = \frac{\text{Total realisasi Belanja Daerah}}{\text{Total PDRB}}$$

#### **e. Rasio Utang Terhadap PDRB**

Rasio ini membandingkan antara total utang dengan total PDRB dalam harga konstan. Manfaat rasio ini untuk mengetahui kemampuan daerah dalam menanggung beban utang dan memenuhi kewajibannya berdasarkan produktivitas yang dimiliki daerah.

Rumus Rasio Utang terhadap PDRB = Total Utang Daerah / PDRB

#### **METODE**

Penelitian yang dilakukan adalah hubungan kausal, dengan ruang lingkup Pemerintah Kota dan Kabupaten di Sumatera Utara dengan tujuan dapat diketahui kinerja keuangan daerah dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Kemudian penelitian dilakukan dengan fakta untuk membuktikan secara empiris bahwa rasio kinerja keuangan mempengaruhi pertumbuhan ekonomi pada Pemerintah Kota dan Kabupaten di Sumatera Utara. Penelitian dilaksanakan di 32 Pemerintah Kota dan Kabupaten di Sumatera Utara selama periode penelitian tahun 2019 sampai dengan 2020. Analisis data dengan menganalisis melalui pendekatan Model Data Panel. Berikut ini model persamaan regresi linier berganda sebagai berikut:

$$\text{LnPDRB} = \beta_0 + \beta_1 \text{RaKemKD} + \beta_2 \text{RaKetKD} + \beta_3 \text{APPD} + \beta_4 \text{RBDPDRB} + \beta_5 \text{RUPDRB} + e \dots (1)$$

Keterangan: LnPDRB (Ln Produk Domestik Regional Bruto dalam harga konstan), RaKemKD (Rasio Kemandirian Keuangan Daerah), RaKetKD (Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah), APPD (Analisis Pertumbuhan Pendapatan Daerah), RBDTPDRB (Rasio Belanja Daerah terhadap PDRB) Dan RUPDRB (Rasio Utang terhadap PDRB).

Kemudian dilakukan pengujian kualitas data untuk menentukan model dalam data panel. Model data panel terdiri dari common effect model, fixed effect model dan random effect model. Uji kualitas data yaitu uji chow, uji hausman dan uji langra multiplier. Dan terakhir dengan pengujian hipotesis yaitu uji parsial, uji simultan dan uji koefisien determinasi.

#### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

##### **Hasil Penelitian**

##### **a. Pengujian Kualitas Data**

Dalam analisis data panel maka tahap pertama adalah melakukan pemilihan model terbaik dari ketiga model yakni *Common Effect Model (CEM)*, *Fixed Effect Model (FEM)*, dan *Random Effect Model (REM)* dengan menggunakan uji Chow dan uji Hausman untuk memperkuat hasil pengujian bahwa model terpilih memang model yang terbaik.

##### **1. Uji Chow**

Uji Chow dilakukan untuk memilih model terbaik antara FEM atau CEM. Hasil Uji Chow adalah sebagai berikut :

**Tabel 1. Hasil Regresi Data Panel dengan Chow Test Pada Pemerintah Kabupaten dan Kota, Sumatera Utara**

PDRB	
Uji Chow Statistik	Probabilitas cross-section chi-square
31	0,0000

Sumber: Data diolah, 2022

Dari hasil tabel 1 bahwa nilai uji chow statistic sebesar 31 dengan nilai prob.cross-section chi-square sebesar  $0,0000 < 0,05$  sehingga dapat disimpulkan FEM lebih tepat dibandingkan dengan CEM.

## 2. Uji Hausman

Uji Hausman dilakukan untuk memilih model terbaik antara FEM atau REM. Hasil Uji Hausman adalah sebagai berikut.

**Tabel 2. Hasil Regresi Data Panel dengan Hausman Test Pada Pemerintah Kabupaten dan Kota, Sumatera Utara**

PDRB	
Uji Hausman	Probabilitas cross-section chi-square
5	0.0058

Sumber: Data diolah, 2022

Dari hasil tabel 2 bahwa nilai statistik uji hausman sebesar 5 dengan nilai prob cross-section random sebesar  $0.0058 > 0.05$ , sehingga dapat disimpulkan bahwa FEM lebih tepat, dan tidak perlu dilanjutkan dengan uji *Lagrange Multiplier* (LM).

## b. Regresi Data Panel

Setelah diketahui ternyata dalam penelitian ini menggunakan model *fixed effect* (FEM), sehingga dapat diperoleh persamaan regresi data panel berikut ini.

**Tabel 3. Hasil Estimasi Regresi Data Panel Model *Fixed Effect* Pada Pemerintah Kabupaten dan Kota, Sumatera Utara dengan Ln PDRB sebagai variabel dependen**

Variabel	Coefisien	T	Probabilitas
Constanta	4.830	15.75 (0.3065)	0,000
RaKemKD ( $X_1$ )	0.112	0.212* (0.5268)	0.833
RaKetKD ( $X_2$ )	-0.294	-0.838* (0,3516)	0.409
APPD ( $X_3$ )	0.090	1.065* (0,085)	0.296
RBDTPDRB ( $X_4$ )	-0.317	-0.451* (0,7034)	0.655
RUPDRB ( $X_5$ )	0,146	0.035* (4.0838)	0.971

Sumber: Data diolah, 2022

Angka dalam kurung adalah standart error, \*\*\*  $p < 1\%$ , \*\*  $p < 5\%$  dan \*  $p < 10\%$

Kemudian akan diperoleh hasil regresi data panel dengan Model *Fixed Effect* maka persamaan regresi sebagai berikut:

$$\text{LnPDRB} = 4.830 + 0.112 \text{ RaKemKD} - 0.294 \text{ RaKetKD} + 0.090 \text{ APPD} - 0.317 \text{ RBDTPDRB} + 0,146 \text{ RUPDRB}$$

### 3. Pengujian Hipotesis

#### a. Uji Simultan (Uji F)

Uji simultan dalam penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah Rasio Kemandirian Keuangan Daerah, Ketergantungan Keuangan Daerah, Analisis Pertumbuhan Pendapatan Daerah, Rasio Belanja Daerah terhadap Produk Domestik Regional Bruto dan Rasio Utang Daerah terhadap Produk Domestik Regional Bruto berpengaruh secara simultan terhadap Produk Domestik Regional Bruto dalam Harga Konstan pada Pemerintah Kota/Kabupaten di Sumatera Utara. Berikut ini hasil uji simultan dapat dilihat pada tabel tersebut.

**Tabel 4. Uji Simultan ( Uji F)**

F-Statistic	Probabilitas (F-Statistic)
4449.506	0.000000

Sumber : Data diolah, 2022

Dari hasil Eviews dengan Model *Fixed Effect* (FEM) maka diperoleh F-hitung sebesar 4449.506, dengan tingkat probabilitas 0.000000. Dengan demikian disimpulkan,  $p = 0.000000 < \alpha = 0.05$ , bahwa Rasio Kemandirian Keuangan Daerah, Ketergantungan Keuangan Daerah, Analisis Pertumbuhan Pendapatan Daerah, Rasio Belanja Daerah terhadap Produk Domestik Regional Bruto dan Rasio Utang Daerah terhadap Produk Domestik Regional Bruto berpengaruh secara simultan terhadap Produk Domestik Regional Bruto dalam Harga Konstan pada Pemerintah Kota/Kabupaten di Sumatera Utara.

#### b. Uji Parsial (Uji-t)

Uji parsial dalam penelitian ini bertujuan untuk menguji Rasio Kemandirian Keuangan Daerah, Ketergantungan Keuangan Daerah, Analisis Pertumbuhan Pendapatan Daerah, Rasio Belanja Daerah terhadap Produk Domestik Regional Bruto dan Rasio Utang Daerah terhadap Produk Domestik Regional Bruto berpengaruh secara parsial terhadap Produk Domestik Regional Bruto dalam Harga Konstan pada Pemerintah Kota/Kabupaten di Sumatera Utara. Berikut ini hasil uji parsial dapat dilihat pada tabel tersebut adalah

**Tabel 5. Uji Parsial ( Uji t)**

Variabel	T	Probabilitas
Constanta	15.75 (0.3065)	0,000
RaKemKD (X <sub>1</sub> )	0.212* (0.5268)	0.833
RaKetKD (X <sub>2</sub> )	-0.838* (0,3516)	0.409
APPD (X <sub>3</sub> )	1.065* (0,085)	0.296
RBDTPDRB (X <sub>4</sub> )	-0.451* (0,7034)	0.655
RUPDRB (X <sub>5</sub> )	0.035* (4.0838)	0.971

Hasil uji parsial dalam tabel 5 adalah Variabel Rasio Kemandirian Keuangan Daerah tidak berpengaruh positif terhadap Produk Domestik Regional Bruto dalam Harga Konstan pada Pemerintah Kota/Kabupaten di Sumatera Utara. Variabel Ketergantungan Keuangan Daerah ( $X_2$ ) dengan t-hitung sebesar -0.838 dengan tingkat probabilitas 0.409. Maka Ketergantungan Keuangan Daerah tidak berpengaruh negatif terhadap Produk Domestik Regional Bruto dalam Harga Konstan pada Pemerintah Kota/Kabupaten di Sumatera Utara. Variabel Analisis Pertumbuhan Pendapatan Daerah ( $X_3$ ) dengan t-hitung sebesar 1.065 dengan tingkat probabilitas 0.296. Maka Analisis Pertumbuhan Pendapatan Daerah tidak berpengaruh positif terhadap Produk Domestik Regional Bruto dalam Harga Konstan pada Pemerintah Kota/Kabupaten di Sumatera Utara. Variabel Rasio Belanja Daerah terhadap Produk Domestik Regional Bruto ( $X_4$ ) dengan t-hitung sebesar -0.451 dengan tingkat probabilitas 0.655. Maka Rasio Belanja Daerah terhadap Produk Domestik Regional Bruto tidak berpengaruh negatif terhadap Produk Domestik Regional Bruto dalam Harga Konstan pada Pemerintah Kota/Kabupaten di Sumatera Utara. Variabel Rasio Utang Daerah terhadap Produk Domestik Regional Bruto ( $X_5$ ) dengan t-hitung sebesar 0.035 dengan tingkat probabilitas 0.971. Maka Rasio Utang Daerah terhadap Produk Domestik Regional Bruto tidak berpengaruh positif terhadap Produk Domestik Regional Bruto dalam Harga Konstan pada Pemerintah Kota/Kabupaten di Sumatera Utara.

### c. Uji Koefisien Determinasi ( $R^2$ )

Uji Koefisien determinasi ini bertujuan untuk melihat seberapa besar kemampuan model dalam menerangkan variabel dependen. adalah

**Tabel 6 Uji Koefisien Determinasi**

R Squared	Adjusted R Squared
0.9998	0,9996

Sumber : Data diolah, 2022

Dari hasil tabel 6, bahwa diperoleh nilai R Squared sebesar 0,9998 dan nilai Adjusted R Squared sebesar 0,9996. Hal ini menunjukkan bahwa 99,96 % variabel Rasio Kemandirian Keuangan Daerah, Ketergantungan Keuangan Daerah, Analisis Pertumbuhan Pendapatan Daerah, Rasio Belanja Daerah terhadap Produk Domestik Regional Bruto dan Rasio Utang Daerah terhadap Produk Domestik Regional Bruto mempengaruhi Produk Domestik Regional Bruto dalam Harga Konstan pada Pemerintah Kota/Kabupaten di Sumatera Utara sedangkan sisanya 0.04 % dijelaskan oleh faktor lain yang tidak dijelaskan dalam penelitian ini seperti variabel keuangan daerah yaitu Dana Bagi Hasil Pajak, Dana Alokasi Khusus dan Pendapatan Asli Daerah.

### Pembahasan

Pertumbuhan ekonomi merupakan peningkatan ekonomi masyarakat yang menyebabkan peningkatan jumlah produksi barang dan jasa di suatu daerah setiap periodenya. Kondisi pertumbuhan ekonomi di pemerintah kabupaten dan kota, Sumatera Utara masa sebelum covid19 masih stabil, tetapi ditahun 2020 masa covid19 masing-masing daerah pertumbuhan ekonomi mengalami penurunan. Untuk itu peneliti ingin melihat apakah indikator dari kinerja keuangan daerah mempengaruhi kondisi pertumbuhan ekonomi di Sumatera Utara. Berdasarkan hasil penelitian dengan menggunakan data panel bahwa hasil kualitas data

penelitian ini dengan model fixed effect. Maksudnya 32 pemerintah kabupaten dan kota di Sumatera Utara memiliki pertumbuhan ekonomi yang tidak terlalu berbeda di masa sebelum covid19 dan masa covid 19, mereka sama-sama mengalami fluktuasi pertumbuhan ekonomi.

Untuk hasil statistik secara parsial Rasio Kemandirian Keuangan Daerah tidak berpengaruh positif terhadap Produk Domestik Regional Bruto dalam Harga Konstan. Penelitian ini tidak sejalan dengan Nih Lu (2014) dan Siregar, O.K (2021) dan Annisa (2017) bahwa rasio kemandirian keuangan daerah berpengaruh positif terhadap PDRB dalam Harga Konstan. Tetapi sejalan dengan Kumpangpune, dkk (2019) mengatakan rasio kemandirian tidak berpengaruh negatif terhadap pertumbuhan ekonomi di Kota Bitung. Semakin mandiri daerah dalam mengelola keuangannya maka akan semakin tinggi pertumbuhan ekonomi. Rasio Kemandirian keuangan daerah di 32 Pemerintah Kabupaten dan Kota Sumatera Utara mengalami penurunan karena dana transfer pemerintah pusat lebih besar dibandingkan pendapatan asli daerah yang dimiliki pemerintah daerah.

Analisis Pertumbuhan Pendapatan Daerah dan Rasio Utang Daerah terhadap Produk Domestik Regional Bruto tidak berpengaruh positif terhadap Produk Domestik Regional Bruto dalam Harga Konstan. Kemudian Rasio Belanja Daerah terhadap Produk Domestik Regional Bruto dan Ketergantungan Keuangan Daerah tidak berpengaruh negatif terhadap Produk Domestik Regional Bruto dalam Harga Konstan pada 32 Pemerintah Kota/Kabupaten di Sumatera Utara. Pemerintah daerah mengalami penurunan aktivitas sehingga untuk memenuhi pencapaian target pendapatan daerah mengalami penurunan akibat dampak pademik covid19. Pemerintah daerah belum sepenuhnya melakukan transaksi pembayaran digital untuk pajak daerah dan retribusi daerah, ini yang menyebabkan pendapatan menurun. Pemerintah pusat ditahun 2021 sudah membuat Peraturan tentang pembayaran pajak daerah dan retribusi daerah secara sistem online, tetapi masih banyak pemerintah daerah yang belum melaksanakannya. Sehingga pendapatan daerah di masa pademik covid19 tidak dapat memenuhi belanja daerah, dimana belanja daerah pada masa covid19 lebih optimal di distribusikan ke belanja kesehatan. Belanja infrastruktur, belanja pendidikan masa itu tidak optimal dilaksanakan karena sedikit yang bisa terpenuhi akhirnya perputaran dalam menghasilkan pendapatan pajak dan retribusi daerah tidak tercapai. Ada beberapa pemerintah daerah yang sebelumnya tidak memiliki utang kepada daerah lain maka karena kondisi covid19 mengalami penambahan utang seperti pemerintah kabupaten Tapanuli Utara dan Simalungun.

Hasil penelitian secara simultan bahwa Rasio Kemandirian Keuangan Daerah, Ketergantungan Keuangan Daerah, Analisis Pertumbuhan Pendapatan Daerah, Rasio Belanja Daerah terhadap Produk Domestik Regional Bruto dan Rasio Utang Daerah terhadap Produk Domestik Regional Bruto berpengaruh secara simultan terhadap Produk Domestik Regional Bruto dalam Harga Konstan pada 32 Pemerintah Kota/Kabupaten di Sumatera Utara dengan nilai uji koefisien determinasi sebesar 99,96% dan sisanya 0.04% dipengaruhi oleh variabel lainnya tidak dalam penelitian ini.

## **KESIMPULAN DAN SARAN**

Berdasarkan hasil dan analisa yang dilakukan penelitian memperoleh kesimpulan bahwa penelitian ini menggunakan Model Fixed Effect dengan data panel, menunjukkan hasil secara parsial bahwa Rasio Kemandirian Keuangan Daerah, Ketergantungan Keuangan Daerah, Analisis Pertumbuhan Pendapatan Daerah, Rasio Belanja Daerah terhadap Produk Domestik Regional Bruto dan Rasio Utang Daerah terhadap Produk Domestik Regional Bruto tidak berpengaruh positif terhadap Produk Domestik Regional Bruto dalam Harga Konstan pada Pemerintah Kota/Kabupaten di Sumatera Utara. Kemudian secara simultan bahwa Rasio Kemandirian Keuangan Daerah, Ketergantungan Keuangan Daerah, Analisis Pertumbuhan Pendapatan Daerah, Rasio Belanja Daerah terhadap Produk Domestik Regional Bruto dan Rasio Utang Daerah terhadap Produk Domestik Regional Bruto berpengaruh terhadap Produk Domestik Regional Bruto dalam Harga Konstan pada Pemerintah Kota/Kabupaten di Sumatera Utara . Untuk Pemerintah Kota dan Kabupaten di Sumatera Utara disarankan harus dapat mengikuti kemajuan teknologi seperti menggunakan pembayaran pajak daerah dan retribusi daerah secara sistem digital, karena Peraturan pemerintah sudah mengizinkan untuk melakukan transaksi secara online. Ini sangat membantu jika daerah mengalami bencana wabah penyakit covid19 atau tidak mengalami lagi harus tetap menggunakan teknologi agar tercapai keseimbangan kinerja pemerintah yaitu 3E (Ekonomis, Efisien dan Efektif). Kemudian Membuat kebijakan pengawasan untuk pencapaian target pendapatan daerah dengan memberikan apresiasi bagi ASN daerah yang berhasil memenuhi target pendapatan daerah secara optimal. Dan dapat memulihkan kondisi belanja daerah yang berkontribusi kearah pembangunan daerah sehingga pertumbuhan ekonomi optimal.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Aditya, (2018) Pengaruh Dana Alokasi Umum, Pendapatan Asli Daerah, Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran, Luas Wilayah, Serta Belanja Barang Dan Jasa Terhadap Belanja Modal. *Tesis, Magister Akuntansi Fakultas Ekonomi UNIB.*
- Ardhani, P. (2011). Pengaruh Pertumbuhan ekonomi, Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus terhadap Pengalokasian Anggaran
- Arwati, (2013). *Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah dan Dana lokasi Umum Terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja Modal pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Propinsi Jawa Barat.* Seminar Nasional Teknologi Informasi dan Komunikasi Terapan 2013 (SEMANTIK 2013). 498-507.
- Ahmad, (2014) *Ekonomi Pembangunan dan Perencanaan. PT. Raja Grafindo Persada.* Jakarta.
- Boediono. (2010). *Seri Sinopsis Pengantar Ekonomi No.1 Ekonomi Mikro.* Edisi Kedua. Yogyakarta : BPFE
- Erlina, (2008) *Ilmu Makro Ekonomi, Edisi 17(terjemahan).* Penerbit Media Global Edukasi. Jakarta.
- Faridi, M. Z. (2011). Contribution of Fiscal Decentralization to Economic growth:

- Evidence from Pakistan. *Pakistan Journal of Social Sciences (PJSS)*, Vol. 31, No. 1 (June 2011):1-13
- Febriana,(2015). Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Belanja Modal pada Provinsi Jawa Timur. *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi*. Vol.4 No.9 2015. Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia (STIESIA) Surabaya
- Ghozali, I. (2011). *Analisis Multivariat dengan Program SPSS*, Edisi Ketiga. Jakarta. PT. Elex.
- Hasan, T.I.B. (2012). Pengaruh Belanja Modal Pemerintah dan Produk Domestik Regional Bruto Terhadap Penduduk Miskin di Aceh. *Journal SAINS Riset*,1(1).
- Halim Abdul (2009) *Akuntansi Keuangan Daerah*, Edisi Revisi, Salemba Empat, Jakarta.
- Herdiansyah, H. 2010. *Metodologi Penelitian Kualitatif Untuk Ilmu-Ilmu Sosial*. Jkt. Salemba Humanika.
- Ikhlas, (2011) *Otonomi Daerah dan Desentralisasi. Edisi 1*, Pustaka Setia. Bandung.
- Kusuma, H. 2016. Desentralisasi Fiskal dan Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia". *Jurnal Ekonomi Kuantitatif Terapan*, Vol. 9, No. 1
- Koncoro, (2014) *Otonomi dan Pembangunan Daerah: Reformasi, Perencanaan Strategi dan Peluang*. Penerbit Erlangga. Jakarta.
- Maulida, A. d. 2011. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum Terhadap Kemandirian Daerah dan Pertumbuhan Ekonomi Daerah (Studi Kasus di 36 Kabupaten/Kota di Kalimantan)". *Jurnal Ilmu Ekonomi*, Vol., No.1
- Nordiawan, D. (2012). *Anggaran disuatu pemerintahan*. Jakarta : Salemba Empat.
- Nisa, (2017) Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dan Dana Alokasi Khusus Terhadap Produk Domestik Regional Bruto Di Kabupaten Dan Kota Provinsi Sulawesi Tengah. *Tesis, Magister Manajemen*. Universitas Tadulako. Palu.
- Nuarisa, Ardhian Sheila. (2013). Pengaruh PAD, DAU dan DAK Terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja Modal. *Accounting Analysis Journal* Vol. 2, No.1 Universitas Negeri Semarang.
- Oktavia, (2018) Pengaruh Produk Domestik Regional Bruto, Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum Dan Dana Alokasi Khusus Terhadap Belanja Modal (Survei Pada Pemerintah Kabupaten/Kota Se-Sulawesi Tengah). *Tesis, Magister Manajemen* Univesitas Tadulako, Palu.
- Oktriniatmaja, Rini. 2011. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus Terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja Modal Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Pulau Jawa, Bali dan Nusa Tenggara. *Tesis, Magister Manajemen* Universitas Sebelas Maret.
- Pelealu, A. M. (2014). "Pengaruh Dana Alokasi Khusus (DAK), dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Terhadap Belnja Modal Pemerintah Kota Manado Tahun 2003-2012". *Jurnal EMBA*, 1191 Vol.1 No.4 Desember, Hal. 1189-1197. ISSN 2303-1174.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 tahun 2011 *tentang Perubahan Kedua*

- atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah*
- Rusiadi, (2014) *Metode Penelitian Administrasi*. Penerbit Alfabeta Bandung.
- Sirait (2009) *Ilmu Makro Ekonomi, Edisi 17(terjemahan)*. Penerbit Media Global Edukasi. Jakarta.
- Subekan, (2012) *Sistem Perencanaan dan Penganggaran Pemerintahan Daerah di Indonesia*, Salemba Empat, Jakarta
- Tahar Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Dan Dana Alokasi Umum Terhadap Kemandirian Daerah Dan Pertumbuhan Ekonomi Daerah *Jurnal Akuntansi dan Investasi* Vol. 12. 2011
- Vanesa,(2019) Teori Pertumbuhan Ekonomi, *Jurnal Paradigma Ekonomika* Vol. 14. No. 1 Edisi 1. BPFE. Yogyakarta.
- Yaser (2015) *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah*. Penerbit Andi : Yogyakarta.
- Wandira. (2013). *Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), Dana Bagi Hasil (DBH) Terhadap Pengalokasian Belanja Modal*.